

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Sampah dan Pengelolaan Sampah

1. Definisi sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Definisi ini memberikan pemahaman bahwa sampah merupakan hasil sampingan dari berbagai aktivitas manusia maupun proses alami yang memerlukan pengelolaan khusus untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat (Mamunur Rahman, M., Hossain, M. A., & Karim, 2021) Pengelolaan sampah menurut undang-undang tersebut adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Konsep ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi permasalahan sampah mulai dari sumber hingga tempat pemrosesan akhir (Kaza *et al.*, 2018)

2. Klasifikasi sampah

Klasifikasi sampah berdasarkan karakteristiknya terbagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, sampah organik merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai secara alami, seperti sisa makanan dan daun. Kedua, sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai, seperti plastik dan kaca. Ketiga, sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan (Widiastuti *et al.*, 2022). Pemahaman terhadap klasifikasi ini sangat penting karena dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*,

kemampuan membedakan jenis sampah menentukan kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) individu dalam melakukan pemilahan yang efektif¹

3. Dampak sampah terhadap kesehatan lingkungan

Dampak sampah terhadap kesehatan masyarakat sangat signifikan. Pengelolaan yang tidak tepat dapat menjadi sumber penyakit melalui vektor seperti lalat dan nyamuk, serta mencemari air tanah dan udara (Astuti, A. D., Frimawaty, E., & Dwiyoitno, 2023). (Abubakar *et al.*, 2022) dalam kajian komprehensif mereka tentang dampak pengelolaan sampah di negara-negara Global South menegaskan bahwa praktik pembuangan sampah yang tidak berkelanjutan berkontribusi langsung terhadap polusi tanah, air, dan udara serta meningkatkan risiko kesehatan masyarakat secara sistematis. Dari aspek lingkungan, sampah plastik khususnya memerlukan waktu ratusan tahun untuk terurai dan dapat merusak ekosistem (Wojnowska-baryła, Bernat and Zaborowska, 2022). Selain itu, emisi gas metana dari tempat pembuangan sampah berkontribusi langsung terhadap pemanasan global (Zhang *et al.*, 2022). (Mavropoulos, A., & Antoniou, 2022) juga menunjukkan bahwa open dumping dan landfill yang tidak terkelola dengan baik menimbulkan efek karsinogenik dan non-karsinogenik bagi populasi yang tinggal di sekitarnya

4. Prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R)

Prinsip 3R merupakan hierarki pengelolaan sampah yang paling efektif dan berkelanjutan. Reduce adalah upaya mengurangi produksi sampah, Reuse adalah pemanfaatan kembali tanpa proses pengolahan, dan Recycle adalah mendaur ulang sampah menjadi produk baru (Purwaningrum, 2020). (Abubakar *et al.*, 2022) melalui pemodelan PLS-SEM. PLS-SEM adalah metode statistik untuk menguji

hubungan kausal antar konstruk laten (variabel yang tidak bisa diukur langsung) melalui indikator-indikator yang bisa diobservasi. Pemodelan PLS-SEM menunjukkan bahwa implementasi 3R yang terstruktur secara signifikan menurunkan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir sekaligus memberikan nilai ekonomi dari material yang dapat didaur ulang. Implementasi 3R memerlukan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder. Keberhasilan penerapan 3R dapat mengurangi volume sampah secara substansial dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat (Anwar, Mone and Arfah, 2022). (Anuardo *et al.*, 2021) menegaskan bahwa kerangka tripartit antara organisasi, pemerintah, dan akademisi merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan program berbasis 3R.

B. TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*)

1. Defenisi dan tujuan TPS 3R

TPS 3R adalah instalasi pengolahan sampah skala kawasan yang menerapkan prinsip 3R dengan melibatkan peran serta masyarakat. TPS 3R bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), memberikan manfaat ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang sehat (Fadhilah, A., Suprihatin, S., & Indrasti, 2021). Konsep ini dikembangkan sebagai solusi desentralisasi yang lebih efektif dengan mengelola sampah di tingkat lokal guna mengurangi biaya operasional pengangkutan (Nurhayati, S., & Irmansyah, 2023). (Education *et al.*, 2024) dalam penelitiannya di Banjarmasin menemukan bahwa TPS 3R yang beroperasi dengan baik mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan secara berkelanjutan.

2. Mekanisme kerja TPS 3R

Mekanisme kerja TPS 3R terdiri dari tiga tahap utama: pemilahan di sumber oleh masyarakat, pengumpulan menggunakan sistem *door-to-door*, dan pengolahan sesuai jenisnya (organik menjadi kompos, anorganik didaur ulang). Efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada koordinasi antara pengelola dan masyarakat serta sistem monitoring yang berkelanjutan (Maharani, R., Haryanto, B., & Sari, 2021),

3. Peran Strategis dan Faktor Keberhasilan TPS 3R

TPS 3R mendukung target nasional pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2025 sesuai Perpres No. 97 Tahun 2017 (Handayani, S., & Wulandari, 2020). (Education *et al.*, 2024) melalui analisis koheren kebijakan di Indonesia menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara kebijakan nasional dan daerah menjadi hambatan utama dalam pencapaian target pengurangan sampah tersebut. Keberhasilan operasional TPS 3R ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat, ketersediaan sarana prasarana, kemampuan manajerial pengelola, serta dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah daerah (Education *et al.*, 2024). (Dipayani, 2025) dalam studi kasus TPS 3R Pudak Mesari, Desa Darmasaba, Kabupaten Badung, Bali, menemukan bahwa optimasi TPS 3R tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan manajerial, tetapi juga sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi dan komitmen masyarakat dalam menerapkan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari.

C. Konsep Partisipasi Masyarakat

1. Definisi partisipasi

Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif individu dalam proses pengambilan keputusan. Mengacu pada tinjauan (Reed, 2020), partisipasi merupakan proses kolaboratif yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam perencanaan dan implementasi pembangunan. World Health Organization (2022) mendefinisikan partisipasi sebagai proses di mana individu mengambil tanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan mereka sendiri serta masyarakat. Syonga (2023) dalam studinya di Tanzania menguatkan bahwa efektivitas program pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana warga merasa memiliki program tersebut dan terlibat aktif dalam setiap tahapan pelaksanaannya.

2. Tingkat dan bentuk partisipasi

Tingkatan partisipasi dibedakan menjadi level informasi, konsultasi, kemitraan, hingga pemberdayaan (Anwar Andika, Mone Ansyari, 2022). Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar peluang keberhasilan program. Bentuk partisipasi dapat berupa fisik (tenaga), finansial (dana), sosial (organisasi), dan mental (ide/gagasan). (Kalra, 2020) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada hakikatnya merupakan respons terhadap ketidakmampuan pemerintah memenuhi layanan pengelolaan sampah yang memadai, sehingga pemberdayaan komunitas menjadi solusi yang paling berkelanjutan.

D. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi

1. Pengetahuan dan sikap

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia terhadap objek tertentu. Dalam pengelolaan sampah, pengetahuan mencakup pemahaman jenis sampah dan cara pemilahan (Budiman, 2013). Pengetahuan berkorelasi positif dengan perilaku partisipasi; peningkatan pengetahuan melalui edukasi dapat secara nyata meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah (Nurhasanah, S., Ardiansyah, F., & Putri, 2023). (Eshete, Desalegn and Tigu, 2023) dalam studi KAP (Knowledge, Attitudes, and Practices) mereka menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat pengetahuan rumah tangga tentang pengelolaan sampah dengan praktik pembuangan sampah yang baik. Sikap, menurut (Zheng *et al.*, 2022) merupakan predisposisi tindakan yang terdiri dari komponen kognitif, afektif, dan konatif. Sikap positif terhadap program TPS 3R akan mendorong partisipasi yang lebih aktif (Fitriani, E., Hartono, B., & Maulana, 2022). (Etim, 2024) menegaskan bahwa peningkatan kesadaran publik tidak sekadar membentuk pengetahuan, melainkan juga berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah secara nyata.

2. Prilaku dan kebiasaan (*Theory of Planned Behavior*)

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Bosnjak, Ajzen and Schmidt, 2020), perilaku ditentukan oleh niat yang dihubungkan oleh sikap, norma subjektif (tekanan sosial), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Niat masyarakat untuk berpartisipasi dihubungkan oleh dukungan lingkungan sekitar dan keyakinan bahwa mereka mampu melakukan pengelolaan sampah dengan baik (Lestari, P., & Yusuf, 2021). (Wu, Zhu and Zhai, 2022) dalam studi mereka yang melibatkan 434

mahasiswa di Tiongkok menemukan bahwa norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan pengetahuan lingkungan merupakan prediktor utama perilaku pengelolaan sampah. (Bardus and Massoud, 2022) menguji penerapan TPB pada komunitas pedesaan di Lebanon dan menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku secara bersama-sama dapat memprediksi niat masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah di rumah tangga. (Sadler and Larsen, 2022) menambahkan bahwa publisitas informasi yang intensif dan norma moral berperan sebagai mediator penting yang menghubungkan faktor-faktor TPB dengan niat aktual masyarakat dalam memilah sampah. (Fikadu *et al.*, 2022) dalam studi mereka di Ethiopia menemukan bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan prediktor terkuat niat masyarakat untuk mematuhi praktik pengelolaan sampah padat. (Pan and Liu, 2024) lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam perbandingan antara orang dewasa dan anak-anak, norma subjektif memiliki peran yang lebih menonjol dalam membentuk niat pemilahan sampah pada orang dewasa. (Cao, Qiu and Morrison, 2023) juga mengonfirmasi bahwa seluruh variabel TPB yakni sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berhubungan positif langsung terhadap niat pemilahan sampah. (Bosnjak, Ajzen and Schmidt, 2020) menegaskan bahwa *perceived behavioral control* tidak hanya berhubungan dengan niat tetapi juga secara langsung berhubungan dengan perilaku aktual ketika individu memiliki kendali nyata atas tindakannya.

3. Sarana, prasarana, dan kebijakan

Ketersediaan sarana (wadah sampah, alat pengolah) dan prasarana (bangunan TPS 3R) merupakan prasyarat penting. Fasilitas pendukung berkorelasi signifikan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan

sampah (Wijaya et al., 2022). Selain itu, kebijakan pemerintah desa melalui peraturan desa (Perdes) menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlanjutan program (Indrawati & Suryani, 2022). Anuardo et al. (2022) menegaskan bahwa kemitraan publik-swasta dalam pengembangan infrastruktur sampah merupakan salah satu strategi paling efektif untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Saputra et al. (2023) menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia masih belum selaras antara level nasional dan daerah, sehingga diperlukan penguatan regulasi lokal melalui peraturan desa yang lebih operasional dan terukur. Notoatmodjo (2018) menambahkan bahwa ketersediaan sarana fisik merupakan salah satu determinan perilaku kesehatan yang paling konsisten, termasuk dalam konteks perilaku higiene lingkungan seperti pemilahan sampah.

4. Motivasi

Motivasi dalam hal ini mencakup dua dimensi utama dari Theory of Planned Behavior. Pertama, kontrol perilaku (perceived behavioral control) merupakan keyakinan individu mengenai sejauh mana ia memiliki kemampuan, sumber daya, dan kesempatan untuk melakukan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 2005). Kedua, norma subjektif yang dapat diartikan sebagai persepsi individu mengenai tekanan sosial dari orang atau kelompok yang dianggap penting (significant others) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Bosnjak et al., 2020). Zhang et al. (2020) dalam studi mereka di pedesaan Tiongkok mengintegrasikan TPB dengan model aktivasi norma dan menemukan bahwa norma subjektif memiliki efek tidak langsung terhadap niat pemilahan sampah melalui mediasi sikap. (Cao, Qiu and Morrison, 2023) menambahkan bahwa modal sosial berupa kepercayaan

antarpersonal secara signifikan memperkuat hubungan norma subjektif dan kontrol perilaku terhadap niat masyarakat dalam memilah sampah. (Li *et al.*, 2023) juga menemukan bahwa faktor situasional termasuk ketersediaan fasilitas dan dukungan lingkungan sekitar merupakan pendorong terbesar partisipasi rumah tangga dalam daur ulang sampah.

5. Teori Lawrence Green (PRECEDE-PROCEED)

Teori Lawrence Green merupakan salah satu kerangka teoritis yang banyak digunakan dalam penelitian perilaku kesehatan masyarakat. Green (1991) mengemukakan bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh tiga kelompok faktor utama yang saling berinteraksi, yaitu faktor predisposisi (*predisposing factors*), faktor pendukung (*enabling factors*), dan faktor pendorong (*reinforcing factors*).

Faktor predisposisi adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan menjadi dasar atau motivasi awal terbentuknya suatu perilaku. Faktor ini mencakup pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai, dan persepsi seseorang terhadap suatu perilaku tertentu (Green & Kreuter, 2005). Dalam konteks partisipasi masyarakat terhadap TPS 3R, faktor predisposisi tercermin pada tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah serta sikap mereka terhadap program TPS 3R. Pengetahuan yang memadai dan sikap yang positif merupakan prasyarat awal terbentuknya niat dan tindakan partisipasi.

Faktor pendukung adalah faktor yang memfasilitasi terwujudnya suatu perilaku. Faktor ini mencakup ketersediaan sumber daya, aksesibilitas fasilitas, keterampilan, dan infrastruktur yang mendukung individu untuk bertindak sesuai niatnya (Green & Kreuter, 2005). Dalam penelitian ini, faktor pendukung diwakili

oleh ketersediaan sarana dan prasarana TPS 3R, seperti armada pengangkutan sampah, tempat pemilahan, dan fasilitas pengomposan. Tanpa ketersediaan fasilitas yang memadai, niat masyarakat untuk berpartisipasi sulit diwujudkan menjadi tindakan nyata.

Faktor pendorong adalah faktor yang memperkuat atau memperlemah motivasi individu untuk berperilaku, yang bersumber dari lingkungan sosial di sekitarnya. Faktor ini mencakup dukungan keluarga, tokoh masyarakat, petugas kesehatan, serta kebijakan dan program pemerintah (Green & Kreuter, 2005). Dalam konteks penelitian ini, faktor pendorong diwakili oleh dukungan pemerintah desa dan pengelola TPS 3R dalam bentuk sosialisasi, pembinaan, regulasi lokal, dan penegakan peraturan desa tentang pengelolaan sampah.

6. Integrasi Theory of Planned Behavior dan Teori Lawrence Green

Penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka teori secara komplementer, yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen dan Teori Lawrence Green. Kedua teori ini dipilih karena masing-masing memiliki kekuatan yang saling melengkapi dalam menjelaskan perilaku partisipasi masyarakat secara komprehensif.

TPB unggul dalam menjelaskan mekanisme psikologis internal yang mendorong niat dan perilaku individu, melalui tiga konstruk utama: sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Namun, TPB memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi faktor-faktor struktural eksternal yang berada di luar kendali individu, seperti ketersediaan fasilitas dan dukungan institusional

Di sinilah Teori Green berperan melengkapi. Green memperluas perspektif analisis dengan menempatkan faktor-faktor eksternal — yaitu ketersediaan sarana prasarana sebagai *enabling factors* dan dukungan pemerintah/pengelola sebagai *reinforcing factors* — sebagai determinan perilaku yang setara pentingnya dengan faktor internal individu (Green & Kreuter, 2005). Dengan demikian, integrasi kedua teori ini memungkinkan penelitian untuk memotret perilaku partisipasi secara lebih menyeluruh, baik dari dimensi psikologis internal maupun kondisi struktural eksternal.

Secara operasional, variabel pengetahuan dan sikap bersumber dari konstruk *predisposing factors* Teori Green sekaligus berkaitan dengan konstruk sikap dalam TPB. Variabel kontrol perilaku dan norma subjektif bersumber dari konstruk TPB. Variabel sarana dan prasarana merepresentasikan *enabling factors* Green, sementara variabel dukungan pemerintah desa dan pengelola TPS 3R merepresentasikan *reinforcing factors* Green. Keenam variabel ini secara bersama-sama membentuk model analisis yang komprehensif untuk memahami partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan TPS 3R di Desa Pejarakan.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sejenis telah dilakukan dengan fokus pada faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis TPS 3R. Penelitian oleh (Putera Prakoso Bhairawa *et al.*, 2023) di Kota Surabaya menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan dukungan pemerintah berhubungan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dengan kontribusi sebesar 72,3%. Temuan ini menekankan bahwa dalam lingkungan perkotaan, hubungan figur otoritas atau norma subjektif sangat menentukan tindakan individu.

Studi yang dilakukan oleh (Wahyuni *et al.*, 2022) di Kabupaten Bantul menemukan bahwa faktor ketersediaan sarana prasarana menjadi faktor paling dominan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) oleh masyarakat sangat bergantung pada kemudahan akses terhadap fasilitas pengolahan sampah. Sementara itu, penelitian (Kartika, D., Susanto, W., & Rahman, 2023) di Kota Malang mengungkapkan bahwa kebiasaan masyarakat memiliki hubungan paling kuat terhadap keberlanjutan partisipasi, yang berarti perubahan perilaku memerlukan pendekatan edukasi yang komprehensif dan konsisten.

Penelitian TPB oleh (Rakhmawati *et al.*, 2023) dalam studi pengembangan model TPB yang diperluas di konteks Indonesia menemukan bahwa niat memilah sampah dipengaruhi secara langsung oleh sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kewajiban moral, dan dukungan fasilitas, sementara pengetahuan berpengaruh secara tidak langsung melalui variabel antara. Penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan mengintegrasikan seluruh faktor tersebut — termasuk sarana prasarana dan dukungan pemerintah desa/pengelola TPS 3R — ke dalam satu model TPB yang komprehensif, berfokus spesifik pada unit analisis TPS 3R, serta menguji interaksi antar faktor seperti peran sarana dalam memediasi hubungan pengetahuan terhadap kualitas partisipasi masyarakat.